

Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun

Sulfan¹, Mukhsin²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan, Makassar, Indonesia

 sulfansulfanbima@gmail.com

Abstrak

Ibn Khaldun is an Islamic thinker who is able to build the concept of political philosophy based on objective conditions that occur in the dynamics of life. Ibn Khaldun's thoughts start from sociological analyzes that influence changes in society, especially the political world. This research is based on descriptive research methodology by using library materials in presenting the research. The results of this study indicate that Ibn Khaldun's political philosophy is based on asabiyyah or mutual solidarity based on badawah and hadarah.

Kata Kunci: Ibn Khaldun, Descriptive Methodology, Ashabiyyah, Badawah, Hadarah

Published by
Website

Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan bantuan antar sesamanya. Kehidupan manusia yang senantiasa saling terkait antar sesamanya, membuat manusia mengalami kesadaran akan pentingnya pengorganisasian. Fakta menunjukkan bahwa perilaku manusia dan kecenderungannya mengorganisasi diri dapat didapati mulai dari zaman pra-sejarah hingga zaman sejarah. Praktik-praktik berkelompok sebagai bagian dari relasi sosial untuk mengikat kesadaran kolektif manusia.

Aristoteles seorang pemikir Yunani berpandangan bahwa manusia tak lain adalah

Zoon Politicon (binatang berpolitik).¹ Pandangan ini tentunya memiliki asumsi manusia tidak bisa hidup kecuali harus bersama-sama dengan manusia yang lain dan kehidupan bersama secara perlahan membentuk kesadaran berpolitik.

Kehidupan bersama dan berkelompok yang dimaksud Aristoteles sebagai politik yakni kesadaran manusia mengorganisasi, mengatur kehidupannya dan membangun kesadaran kolektif. Perilaku berkelompok tentunya dimiliki oleh semua makhluk hidup, tetapi kesadaran untuk mengorganisir dan melakukan penataan baik dalam bentuk arsitektur maupun aturan guna mengatur kehidupan itu tidaklah dimiliki oleh makhluk hidup yang lain.

Terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang mengulas soal ketaatan kepada pemimpin dipaparkan lewat konsep *ashabiyyah*, dari konsep ini menggambarkan mengenai kesadaran kolektif yang tumbuh secara alamiah. Sehingga untuk membangun kekuasaan politik yang kuat perlu konsensus bersama, bukan dominasi kelas tertentu melainkan hegemoni yang dicapai lewat konsensus sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berupaya menguraikan dan menyajikan hasil penelitian secara mendalam dengan melakukan penelaan terhadap sumber-sumber kepustakaan terkait. Peneliti menggunakan sumber kepustakaan yang bersifat primer dari karya-karya Ibnu Khaldun dan beberapa karya-karya yang ditulis oleh para pengkaji pemikiran Ibnu Khaldun.

Penyusunan dan pengolahan serta penyajian hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan logika dan kalimat yang berbasis deduktif dan induktif. Sehingga penelitian ini bisa dirampungkan dengan mengikuti metodologi dan perspektif ilmiah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Biografi Ibnu Khaldun

Kehadiran seorang tokoh tidak pernah terlepas dari lingkungan sekitarnya yang membentuk pikiran-pikirannya. Sebab seorang tokoh menjadi anak kandung dari zamannya, sehingga tidaklah mengherankan apabila tokoh-tokoh besar senantiasa hadir dalam setiap zaman yang berbeda dan menjadi obor bagi zamannya maupun setelah ketiadaan sang tokoh. Begitu banyak tokoh yang besar hadir dalam setiap zaman yang berbeda, yang tentunya membawa kekhasan tersendiri dalam pikiran-pikirannya. Kehadiran setiap tokoh dalam setiap zaman menjadi petanda terjadinya dialektika pemikiran yang ikut mempengaruhi lahirnya seorang tokoh. Berbicara tentang pemikiran Ibnu Khaldun tanpa memperbincangkan perjalanan hidupnya seakan ada sesuatu yang luput dari perhatian, sebab salah satu anak tangga yang mesti dilewati untuk memahami seorang Ibnu Khaldun mestilah melewati yakni perjalanan hidupnya.

Pada masa kehidupan Ibnu Khaldun, sekitar abad ke-14 M. suasana dan kondisi

¹ Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik* (Serpong: Marjin Kiri, 2016), h. 10.

suhu politik dalam dunia Islam mengalami berbagai intrik dan konflik dalam internal ummat Islam. Adanya sebuah aspirasi politik dalam tubuh ummat Islam seperti keinginan Andalusia, Spanyol memisahkan diri dari kerajaan Abbasiyah yang terpusat di Bagdad.² Terjadinya berbagai gejolak dalam internal ummat Islam dan keikutsertaan keluarga Ibnu Khaldun dalam gejolak politik tersebut, dapat dilacak pada peristiwa Andalusia memberontak pada pemerintahan dinasti Umawiyah. Pada mulanya pemberontakan tersebut meletus di Isybilia, Sevilla sekarang. Pada pemberontakan tersebut melibatkan dua kakek Ibnu Khaldun yakni Kuraib dan Khalid yang berhasil menggulingkan kekuasaan. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan karier keluarga Ibnu Khaldun, sekaligus terjadinya babak baru dalam perjalanan politik ummat Islam yang mengakhiri kekuasaan yang terpusat dan melahirkan berbagai sultan-sultan kecil. Terlepasnya Andalusia dari kendali kekuasaan pusat menyebabkan terjadinya berbagai intrik politik baik internal maupun eksternal. Dalam internal ummat Islam melahirkan berbagai intrik yang berujung pada penggulingan kekuasaan dan terjadinya kudeta demi kudeta yang silih berganti berkuasa dari satu dinasti ke dinasti yang lain.³

Di luar internal ummat Islam atau lebih tepatnya dari Nasrani, melakukan pemberontakan. Pada masa tersebut keluarga Ibnu Khaldun melakukan transmigrasi dari ke Afrika atau lebih tepatnya Tunisia. Kehadiran keluarga Ibnu Khaldun di Tunisia dapat diterima dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari hubungan yang terjalin jauh sebelum kepindahan keluarga Ibnu Khaldun dan pada masa tersebut keluarga Ibnu Khaldun diangkat menjadi menteri dalam pemerintahan di Tunisia. Berbeda dengan kakek Ibnu Khaldun yang melibatkan diri pada dunia politik dan pemerintahan, sebaliknya ayah Ibnu Khaldun yang bernama Abu Abdillah Muhammad tidak terjun dan aktif melibatkan diri pada dunia politik melainkan terjun dalam dunia intelektual.

Di Tunisia tepat pada tanggal 1 Ramadan tahun 732 H atau pada 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun lahir dengan nama Abd-al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hassan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun.⁴ Terlahir dari keluarga yang terkemuka yang begitu memperhatikan pendidikan membuat pada masa kecilnya Ibnu Khaldun telah mempelajari berbagai pengetahuan dari guru-guru terkemuka. Pada mulanya Ibnu Khaldun belajar menghafal Al-Qur'an yang meliputi pelajaran berbagai gaya pembacaan dan penulisan Al-Qur'an. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mendalami pelajaran fikih mazhab Maliki, hadis rasul dan puisi. Telah menjadi kebiasaan ummat Islam pada masa itu, yang pendidikan pertama yang diterima seseorang berawal dari lingkungan keluarganya. Begitu pula Ibnu Khaldun yang mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang ulama dan intelektual.

Pendidikan yang diterima Ibnu Khaldun selanjutnya berlangsung di mesjid dan tampaknya telah menjadi tradisi dalam dunia Islam bahwa proses pendidikan berlangsung di mesjid. Sehingga mesjid bukan hanya sekedar berfungsi sebagai tempat ibadah yang sifatnya ritus melainkan juga berfungsi sebagai tempat pengajaran. Ibnu Khaldun menempuh pendidikannya di mesjid dan terjadinya gejolak politik di dunia Islam utamanya di Andalusia menyebabkan banyak ulama-ulama dan

¹Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 39.

²Munawir Sjadzali, *Islam dan Politik* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 90

³ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi* (Bandung: Mizan, 2017), h. 1.

intelektual terkemuka berpindah dari Andalusia. Salah satu daerah yang menjadi tujuannya yakni Tunisia dan Ibnu Khaldun banyak bersentuhan dari ulama-ulama yang datang dari Andalusia.

Kehadiran ulama sesudah akibat gejolak politik terjadi seperti Qadli Abu al-Qasim bin Zaitun yang berkelana dari Ifriqiyah ke timur dan bertemu dengan murid-murid Imam Ibnul Khatib, Abu Abdillah bin Syuaib ad-Dakkali datang mengikuti jejaknya. Dari ke dua ulama tersebut penduduk Tunisia banyak mendapatkan pengajaran dan pendidikan.⁵ Hal, tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang ikut serta dalam perjalanan intelektual seorang Ibnu Khaldun. Dalam perjalanan Ibnu Khaldun mengarungi dunia pendidikan guru yang paling berpengaruh dan menjadi guru utamanya yakni Muhammad bin Ibrahim al-Abili, guru besar ilmu-ilmu rasional. Di tengah gairah menuntut ilmu yang dialami oleh Ibnu Khaldun, terjadi wabah penyakit pes atau sampar yang melanda kota kelahirannya yang menyebabkan banyak gugur-gurunya dan orang tuanya meninggal.¹⁶ Kejadian ini pulalah, menyebabkan banyak ulama dan guru-guru ilmu pengetahuan terkemuka termasuk Muhammad bin Ibrahim al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez, Maroko.

Pada saat guru utamanya Muhammad bin Ibrahim al-Abili kembali melakukan perjalanan ke Fez, Maroko. Ibnu Khaldun merasakan kehilangan tokoh dan guru intelektual semenjak kepergian Muhammad bin Ibrahim al-Abili, yang membuat Ibnu Khaldun berada pada dua persimpangan jalan antara terjun ke dunia politik atau melakukan pengembaraan dalam pencarian ilmu pengetahuan. Pada perjalanan hidup yang dialami Ibnu Khaldun keinginan untuk mengembara demi pencarian ilmu pengetahuan tidak membuatnya seketika bisa leluasa berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal, tersebut disebabkan oleh aktifitas dunia politik yang dilakoninya membuatnya bergelut dan berinteraksi dengan kehidupan politik yang membuatnya menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Persentuhan pertama seorang Ibnu Khaldun dalam dunia politik bermula pada saat diangkat menjadi sekretaris negara pada akhir tahun 1350 M, di Tunisia. Pada masa kekuasaan Abu Muhammad bin Tafrakin dari Bani Hafs.¹⁷ Namun, jabatan tersebut tidak diembannya cukup lama, disebabkan terjadinya kudeta dari Bani Hafs yang dipimpin oleh Abu Zaid. Akibat terjadinya kegentingan dan kekacauan politik tersebut, akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah ke Fez, Maroko. Tempat para ulama dan guru-guru terkemuka berada.

Kehadiran Ibnu Khaldun di Maroko tidak serta merta meninggalkan dunia politik, malah kehadiran Ibnu Khaldun diterima dengan baik oleh penguasa Maroko Sultan Abu Inan. Pada saat itu, Ibnu Khaldun ditunjuk oleh Sultan Abu Inan sebagai penasihat ilmiah dan selain ditunjuk menduduki jabatan tertentu, Ibnu Khaldun pun diminta untuk menjabat sekretaris kerajaan. Tetapi, Ibnu Khaldun pun menolak tawaran tersebut, salah satu alasan mengapa Ibnu Khaldun senang dengan jabatan tertentu tak lain adalah kesempatannya bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh ulama dan ilmuan terkemuka baik dari Tunisia maupun Andalusia yang berkunjung ke istana kerajaan.

Ditengah hiruk pikuk kehidupan politik yang dijalani oleh Ibnu Khaldun selama berada pada penguasa Maroko Sultan Abu Inan, hubungan dekat Ibnu Khaldun dengan Muhammad penguasa al-Muwahhidun yang dimakzulkan dan berada di penjara. Kedekatan Ibnu Khaldun tersebut, menyebabkan menjelang akhir hayat

⁴ Ibn Khaldun, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, *Muqaddimah* (Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 536.

Sultan Abu Inan berkomplot untuk melarikan diri dan mengembalikan kekuasaannya. Tetapi, konspirasi antara Ibnu Khaldun dengan Muhammad diketahui oleh Sultan Abu Inan menyebabkan Ibnu Khaldun dijebloskan ke dalam penjara. Selama dalam penjara tersebut Ibnu Khaldun menuliskan pujian untuk Sultan Abu Inan, yang menyebabkan sang sultan menerima pujiannya dan berjanji untuk membebaskannya.

Terlepasnya Ibnu Khaldun dari penjara tidak serta merta membuatnya tidak terlibat untuk urusan politik, pada saat Abu Salim dideportasi ke Andalusia yang merupakan saudara dari Sultan Abu Inan. Selama berada dipengasingan tersebut, Abu Salim berupaya merebut kekuasaan dan pada saat yang sama Mansur bin Sulaiman berhasil merebut kekuasaan dari perdana menteri al-Hasan dan putra sultan yang masih bayi yang bernama al-Said bin Abu Inan. Pada saat yang sama Ibnu Khaldun berbalik kubu dan menerima jabatan sebagai sekretaris al-Mansur. Ketika Abu Salim membutuhkan bantuan untuk mendapatkan dukungan dari para syeikh, ulama dan masyarakat secara luas maka Ibnu Khaldun pun membantunya.⁶ Saat Abu Salim berhasil merebut tahta, maka sang Sultan Abu Salim mengangkatnya sebagai sekretarisnya. Jabatan tersebut tidak dipegang Ibnu Khaldun dalam kurung waktu cukup lama, sebab Sultan Abu Salim memberinya tanggung jawab baru dengan jabatan hakim yang tidak ditangani dengan hukum syariah. Tak berselang lama setelah pengangkatannya Sultan Abu Salim akhirnya meninggal dunia, melihat kondisi politik yang kembali tak menentu yang membuat Ibnu Khaldun mengirim istri dan anaknya di Konstantin.

Ibnu Khaldun tidak ikut bersama istri dan anaknya menuju Konstantin, tetapi Ibnu Khaldun kembali melanjutkan perjalanan menuju Granada. Kedatangan Ibnu Khaldun di Granada di sambut baik oleh penguasa Sultan Muhammad dan sekaligus diutus sebagai duta untuk menemui raja Kristen di Castille yang bernama Pedro, untuk mengakhiri perjanjian damai. Selama berada di Castille tersebut untuk pertama kali Ibnu Khaldun menulis sejarah tentang Banu Khaldun yang pernah berdiam di Sevilla. Menyadari besarnya peranan keluarga Ibnu Khaldun dimasa lalu raja Pedro pun membujuk Ibnu Khaldun untuk menetap dan semua peninggalan Banu Khaldun yang telah disita akan dikembalikan.⁷ Tetapi, Ibnu Khaldun menolak permintaan raja Pedro dan lebih memilih kembali ke Sultan Muhammad. Setelah pulang dari tugas tersebut, karena kedekatannya dengan Ibn al-Khatab yang melakukan konspirasi membuat Sultan Muhammad mencurigai Ibnu Khaldun.

Ditempat yang lain, Muhammad penguasa al-Muwahhidun dari Bougie yang bersekongkol dengan Ibnu Khaldun pada masa kekuasaan Sultan Abu Inan telah merebut tahtanya kembali dan memanggil Ibnu Khaldun untuk kembali bergabung dengannya. Keterlibatannya dalam pergumulan politik membuatnya banyak dimusuhi oleh pihak-pihak yang berbeda kepentingan politik dengan Ibnu Khaldun, termasuk saat berada di Biskra dan diminta oleh sultan untuk menggalang dukungan dari suku-suku membuat Ibnu Khaldun hendak mengambil jarak dengan pergumulan dunia politik dan melanjutkan studi penelitiannya sudah lama terpendam. Puncaknya pada saat terjadi pertikaian politik antara Fez dengan Granada, yang membuat Ibnu Khaldun berpindah ke Andalusia. Karena, adanya banyak penguasa yang meragukan kesetiaan Ibnu Khaldun yang sering kali berpindah-pindah dari satu penguasa ke penguasa yang lainnya.

Pada saat Ibnu Khaldun memutuskan untuk berhenti dari aktifitas berpolitik dan

⁶ Fuadi Baali, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 9.

⁷ Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun* (Bandung: Pustaka, 1995), h. 12.

lebih memilih untuk mengasingkan diri di wilayah kekuasaan Banu Arif, yang menampungnya di sebuah benteng. Disanalah Ibnu Khaldun mengawali tulisannya tentang *muqaddimah*. Selama mengasingkan diri selama empat tahun untuk menulis, Ibnu Khaldun akhirnya mengirim surat kepada sultan Tunisia yakni Sultan Abu al-Abbas guna memberinya izin untuk kembali ke Tunisia. Hal, tersebut dilakukan Ibnu Khaldun bukan untuk terlibat kembali pada dunia politik melainkan keinginan Ibnu Khaldun untuk mendapatkan buku-buku orisinal yang diperlukan untuk menulis mengenai sejarah suku-suku pra-Islam. Kehadiran Ibnu Khaldun akhirnya disambut oleh Sultan Abu al-Abbas sekaligus meminta Ibnu Khaldun untuk bertukar pandangan mengenai kehidupan perpolitikan. Kekhawatiran Ibnu Khaldun akan kembali terseret pada kehidupan politik menyebabkan Ibnu Khaldun melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji.⁸ Tetapi, ditengah perjalanan Ibnu Khaldun mengurungkan niatnya dan akhirnya melakukan kunjungan ke Mesir untuk pertama kalinya. Tetapi, Ibnu Khaldun telah dikenal sebelumnya oleh para ilmuwan lewat karyanya *Muqaddimah*.

Kehadiran Ibnu Khaldun di Mesir diterima oleh Sultan al-Tahir al-Barquq yang sekaligus menunjukkan sebagai hakim mazhab Maliki. Sebuah jabatan yang enggan diterimanya, karena adanya kekhawatiran akan adanya intrik politik yang akan kembali menyeretnya lebih jauh. Ditengah menjalani kehidupan sebagai hakim mazhab Maliki dengan bantuan Sultan al-Tahir al-Barquq, istri dan anak Ibnu Khaldun akhirnya dilepas oleh penguasa Tunisia dan dizinkan meninggalkan Tunisia menuju Mesir, namun ditengah perjalanan tersebut kapal yang membawa istri dan anaknya hilang ditengah perjalanan.

Kedamaian yang dirasakan oleh Ibnu Khaldun dibawah Sultan al-Tahir al-Burqaq tak selamanya berjalan mulus, apalagi ketika terjadi gejolak yang menyebabkan sang sultan terpental dari kekuasaannya. Yang menyebabkan Ibnu Khaldun kehilangan pelindung, namun tak berselang lama Sultan al-Tahir al-Burqaq kembali merebut tahtanya. Pada saat itu Ibnu Khaldun kembali masuk gelanggang politik dengan menduduki jabatan dan mempunyai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak selamanya Ibnu Khaldun menduduki jabatan tertentu ada kalanya akibat intrik politik membuatnya harus dibebaskan tugas.

Pada awal 803 H/1400 M, Timur Lenk menyerang dan menyerbu Suriah yang menyebabkan Aleppo berhasil direbut. Mendengar berita tersebut, Sultan al-Tahir al-Burqaq mengerahkan pasukan untuk mencegah pasukan Timur Lenk menyerang Mesir bersama dengan pasukannya yang tentunya menyertakan Ibnu Khaldun yang secara terpaksa ikut setelah dibujuk atas perintah sultan lewat kepala staf. Pada saat Ibnu Khaldun berada di Suriah pernah bertemu dengan Timur Lenk berbicara mengenai banyak hal termasuk sejarah Afrika Utara dan oleh Timur Lenk diminta untuk menuliskan sejarah Afrika Utara yang Ibnu Khaldun akhirnya mempersembahkan buku tentang sejarah Afrika Utara kepada Timur Lenk. Ibnu Khaldun pun mempersembahkan Al-Qur'an yang indah, sajadah dan berbagai makanan Mesir kepada Timur Lenk.⁹ Tetapi, Sultan al-Tahir al-Burqaq akhirnya berbalik ke Mesir untuk menangani berbagai persoalan politik yang terjadi selama berada di Suriah.

⁸ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 45.

⁹ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun* diterjemahkan oleh Isma Soekoto dan Ahmad Baiquni dengan judul *Ibn Khaldun: Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi* (Bandung: Mizan, 2012), h. 27-28.

Pada saat Ibnu Khaldun dengan Timur Lenk bertukar pandangan dan memperbincangkan berbagai hal, salah satu permintaan Ibnu Khaldun kepada Timur Lenk supaya menjaga para ilmuwan dan birokrat ketika melakukan penyerangan dan penaklukan kepada suatu wilayah. Setelah pulang dari Suriah, Ibnu Khaldun kembali menduduki jabatan sebagai hakim mazhab Maliki dan beberapa saat pun diberhentikan akibat intrik politik. Menjelang pengangkatannya kembali sebagai hakim mazhab Maliki Ibnu Khaldun meninggal dunia, pada 26 Ramadan 808 H/1406 H. Ibnu Khaldun akhirnya dikebumikan di pemakaman sufi.¹⁰

II. Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengawali pemikiran politiknya dengan melakukan analisis terhadap kesejarahan dan perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat.¹¹ Yang menjadikan Ibnu Khaldun berbeda dengan pemikir-pemikir politik Muslim sebelumnya. Sebagaimana Al-Farabi yang membangun konsep pemikiran politiknya yang lebih banyak meminjam pemikiran Platon seperti konsep negara *madinatul fadilah* yang berarti negara utama. Konsep negara yang dalam pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi Platon dan melakukan penyesuaian dengan konsep-konsep negara dalam Islam.¹² Sehingga pemikiran politik Ibnu Khaldun berbeda sama sekali dengan para pemikir Muslim sebelumnya.

Kalau pemikir politik Muslim sebelum Ibnu Khaldun bersifat politik yang seharusnya atau politik yang ideal, tetapi dalam pemikiran Ibnu Khaldun pemikiran politik yang mungkin dilakukan atau lebih realistis berpijak pada kenyataan sosial. Pemikiran Ibnu Khaldun terkait negara khususnya bagaimana mempertahankan kekuasaan dan bagaimana sebuah negara mengalami kemunduran ? semua pijakan pemikiran tersebut tidak terlepas dari pengalaman Ibnu Khaldun bersentuhan dengan kekuasaan. Persoalan utama yang mendapat perhatian penting bagi suatu negara tidak terlepas dari bagaimana upaya untuk tetap menjaga masyarakatnya agar senantiasa memiliki perasaan keterkaitan dengan negara.

Petualangan Ibnu Khaldun melintasi batas-batas teritorial satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya, tidak jarang Ibnu Khaldun diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit dan mampu memberikan legitimasi maupun menggalang dukungan kekuasaan bagi penguasa. Dengan pengalaman yang cukup dalam terkait persentuhannya dengan kekuasaan membuat Ibnu Khaldun mampu memberikan analisis dan pemikiran yang sangat dibutuhkan dalam mengolah suatu negara.

Dalam konteks pemikiran politik Ibnu Khaldun yang mengawalinya dengan analisis terhadap konteks sosial, seperti bagaimana suatu negara dapat dipertahankan kedaulatannya dari negara yang lain ? sebab tidak jarang suatu negara mengalami kehancuran akibat adanya pihak-pihak dalam internal negara yang tidak patuh kepada negaranya sendiri. Bahkan tidak jarang malah orang-orang dalam suatu negara berkomplot dengan pihak luar untuk menghancurkan negaranya. Sehingga Ibnu Khaldun meletakkan pemikirannya soal negara dengan terlebih dahulu memahami konteks sosial.

¹⁰ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun* diterjemahkan oleh Isma Soekoto dan Ahmad Baiquni dengan judul *Ibn Khaldun: Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi* (Bandung: Mizan, 2017), h. 28.

¹¹ M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi El-Sutha, *Profil Ilmuwan Muslim Perintis Ilmu Pengetahuan Modern* (Jakarta: Fauzan Inti Kreasi, 2004), h. 333.

¹² Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Cet. III, Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 12.

Berdiri tegaknya suatu negara tidak terlepas dari rakyatnya, dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun kedaulatan suatu negara terletak pada rakyatnya. Sebagaimana dalam *Muqaddimah* yang berbunyi:

“Sebagaimana telah kita ketahui, kemenangan terdapat dipihak yang mempunyai solidaritas yang lebih kuat dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang serta bersedia mati guna kepentingan bersama. Kedudukan sebagai raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir dan batin. Karena itu menjadi sasaran perebutan dan jarang sekali dilepaskan dengan suka rela, sebaliknya selalu di bawah paksaan. Perebutan membawa kepada perjuangan dan peperangan serta runtuhnya singgahsana-singgahsana. Kesemuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dengan solidaritas sosial, seperti telah disebutkan tadi”.¹³

Kedaulatan atau keberadaan suatu negara tidak terlepas dari rakyatnya. Sebab pada dasarnya kekuatan utama suatu negara berasal dari rakyatnya, kehadiran seorang raja tidaklah bermakna apa-apa dibandingkan dengan rakyat. Untuk mempertahankan suatu negara apabila hanya mengandalkan pasukan belaka, tanpa ada rakyat yang memiliki solidaritas sosial bersama guna mempertahankan suatu negara tidaklah berarti.

Pemikiran Ibnu Khaldun terkait negara yang menempatkan rakyat sebagai penentu yang begitu penting dalam suatu negara. Sehingga negara yang tidak yang mempertimbangkan suara dari rakyat pada gilirannya menggiring dirinya pada kehancurannya. Tentu pemikiran Ibnu Khaldun terkait kedaulatan rakyat jauh mendahului para pemikir politik modern, yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam urusan kenegaraan.

Dalam banyak kasus yang terjadi negara yang memiliki solidaritas sosial mampu mengalahkan negara yang besar, tapi dengan solidaritas yang tidak kuat. Sehingga persoalan kejatuhan suatu negara tidak melulu akibat para ksatria/prajurit berkurang melainkan negara harus menyewa prajurit untuk mempertahankan negara. Sebab rakyat telah mengalami penurunan solidaritas sosial, yang mengakibatkan lebih mementingkan urusan individu dibandingkan dengan urusan publik atau urusan bersama. Sejak zaman Yunani klasik telah menggaris bawahi persoalan publik atau bersama, sebagai bagian yang begitu penting, dalam buku sejarah pemikiran politik Yunani dan Romawi menjelaskan mengenai persoalan publik yang membedakan dengan persoalan individu, dengan penjelasan sebagai berikut:

“Yang pertama, membandingkan atau barangkali mempertentangkan Yunani dengan Romawi. Bangsa Romawi telah menetapkan *res publica*, yang secara harfiah berarti “urusan rakyat”, sebagai kebalikan dari *res privata*”.¹⁴

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa persoalan urusan publik atau bersama dalam konteks pemikiran Ibnu Khaldun membutuhkan solidaritas. Negara yang telah mengalami kemapanan dalam persoalan ekonomi yang rakyatnya memiliki

¹³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha dengan judul *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 182.

¹⁴ Cristopher Rowe dan Malcom Schofield, *The Cambridge History of Greek and Roman Political*, diterjemahkan oleh Aris Ananda, Setyo Hermanto dan Tri Wibowo Budi Santoso dengan Judul *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 7.

kecenderungan untuk memperturutkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama, pada dasarnya menjadikan suatu negara mengalami krisis solidaritas.

Perbedaan yang sangat mencolok antara pemikiran politik Ibnu Khaldun dengan para pemikir Muslim sebelumnya, terletak pada kekhasan cara pandang Ibnu Khaldun terkait persoalan tujuan bernegara. Apabila para pemikir Muslim menempatkan Tuhan sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan pada saat yang sama menempatkan sebagai tujuan, sehingga negara yang ideal dengan mengikuti alur pemikiran tersebut yakni penerapan hukum Tuhan atau syariat. Tetapi, bagi Ibnu Khaldun tujuan dari bernegara adalah rakyat, adapun persoalan agama atau semacamnya lebih berperan sebagai alat untuk mewujudkan solidaritas sosial yang berasal dari rakyat. Karena, agama dalam posisi pemikiran Ibnu Khaldun letaknya sebagai alat untuk menegakkan suatu negara, dengan demikian tidak menutup ruang kemungkinan diluar agama adanya alat yang akan membawa suatu negara pada tujuan solidaritas sosial. Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam *Muqaddimah*, yang menjelaskan bahwa:

“Inilah yang terjadi pada bangsa Arab dalam penaklukan awal mulanya Islam, sebab tentara Islam dalam peperangan Yarmuk dan Qadisiyah berjumlah kurang dari 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah kurang dari 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklius, menurut al-Waqidi terdiri dari 400.000 orang. Sungguh pun demikian kedua lawan itu tidak sanggup berhadapan dengan tentara Arab dan keduanya terkalahkan. Ingat pulalah perubahan yang terjadi setelah semangat agama mulai lemah dan rusak, sehingga agama tidak lagi memainkan peranan penting dan kemenangan beralih kepada golongan yang lebih bersatu. Maka suatu negeri mungkin dapat dikalahkan oleh bangsa yang dahulunya di bawah kekuasaan berkat kekuatan yang diberikan oleh agama. Tetapi dalam kenyataannya dahulu suku-suku bangsa tersebut sama atau lebih tinggi kekuatannya daripada negeri itu karena mereka lebih utuh atau lebih dekat kepada tingkatan suku pengembara”.¹⁵

Analisis Ibnu Khaldun terkait persoalan alat yang digunakan oleh negara untuk sampai pada solidaritas sosial, yang sangat terkait dengan fakta-fakta sejarah menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun berbeda dengan pemikir sebelum dan sesudahnya.

Pemikiran politik Ibnu Khaldun menjadi sangat berbeda dibandingkan para pemikir Muslim dalam perjalanan sejarah. Dalam periodisasi sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang lima belas abad, menurut para ahli, dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode klasik (hingga tahun 1250 M), pertengahan (1250-1800 M) dan modern (1800-sekarang).¹⁶ Dengan merujuk pada periodisasi yang dipaparkan oleh Harun Nasution dapat dilakukan klasifikasi mengenai para pemikir Muslim termasuk Ibnu Khaldun. Ketika merujuk pada periodisasi tersebut, maka Ibnu Khaldun masuk dalam periodisasi pemikir politik Islam masa klasik. Pada masa klasik dan pertengahan terdapat beberapa tokoh pemikir politik seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Sedangkan pada masa modern

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha dengan judul *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 193.

¹⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 56.

tokohnya seperti Sayyid Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Abu Al-A'la Al-Maududi dan lain-lain.

Ketika pemikir politik Muslim baik klasik, pertengahan dan modern bahkan tak jarang para pemikir masih mengambil cara pandang yang tidak jauh dari masa klasik. Sebagai contoh Sayyid Jamaluddin Al-Afgani walaupun menggunakan cara-cara modern untuk menyuarakan idenya terkait pemikiran politik, tetapi fokus pemikirannya bisa dikatakan masih dominan pengaruh pemikiran politik klasiknya. Yang kembali melihat persoalan umat Islam yang terjajah dan berada pada cengkraman kolonialisme, sebagai tawaran solusinya Sayyid Jamaluddin Al-Afgani menawarkan solusi *pan Islamisme* atau persatuan Islam.¹⁷ Kendati demikian penghargaan kepada pemikiran politik Sayyid Jamaluddin Al-Afgani, tentu berhak mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Tetapi, terlepas dari pemikiran tersebut apabila mengkaji pemikiran politik Ibnu Khaldun dirasa melampaui zamannya. Sebab zaman sebelumnya Ibnu Khaldun pun dominasi pemikiran politik terletak pada tuhan atau lebih spesifik lagi penerapan syariat. Dalam perkara negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun bukan persoalan penerapan syariat sebagai landasan fundamental dalam bernegara melainkan tujuan bernegara adalah rakyat.

Untuk mewujudkan negara yang kuat diperlukanlah solidaritas sosial. Tetapi, pertanyaannya bagaimana suatu negara memiliki solidaritas yang kuat ? landasan pemikiran Ibnu Khaldun dalam menganalisis persoalan solidaritas sosial dimulai dari adanya dua kelompok sosial yakni *hadarah* (masyarakat yang sudah menetap pada suatu wilayah) dan *badawah* (masyarakat yang masih nomaden atau berpindah-pindah).¹⁸ Dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun kedua kelompok sosial tersebutlah, yang kemudian mengalami suatu transformasi dalam kehidupan bernegara yang akan menumbuhkan solidaritas sosial. Penejelasan terkait *hadarah* dan *badawah* sebagaimana dalam *Muqaddimah* memaparkan bahwa:

“Keterangannya ialah mendirikan bangunan dan merencanakan kota ciri kemajuan, *hadarah* yang disebabkan oleh kemewahan dan kesentosaan, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ia muncul setelah *badawah* dan ciri-cirinya”.¹⁹

Dalam transformasi suatu negara yang telah mengalami suatu kemajuan dan kemakmuran, dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun menjadi petanda kehancuran suatu negara. Semua bermula ketika masyarakat telah mengalami kesenangan secara individu yang menyebabkan kepentingan-kepentingan bersama menjadi terabaikan, yang membuat persoalan solidaritas sosial menjadi renggang dan pada akhirnya membuat suatu negara mengalami kejatuhannya.

Persoalan terkait kehancuran suatu negara tidaklah disebabkan oleh faktor negara kekurangan sumber daya baik manusia maupun ekonomi, melainkan persoalan rakyat suatu negara telah kehilangan solidaritas sosialnya. Dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun posisi rakyat adalah bebas, yang bermakna rakyat memiliki hak menentukan pilihan pada kekuasaan mana menyangkutkan solidaritas sosial-nya. Sehingga rakyat memiliki hak menentukan pilihan, yang tentunya

¹⁷ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontempore* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 63.

¹⁸ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun* diterjemahkan oleh Isma Soekoto dan Ahmad Baiquni dengan judul *Ibn Khaldun Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi* (Bandung: Mizan, 2017), h. 30.

¹⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha dengan judul *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 395.

memiliki perbedaan dengan pandangan pemikiran politik Islam yang lain. Pada dasarnya Ibnu Khaldun telah memulai prinsip demokrasi, yang memberikan kebebasan pada rakyat menentukan pilihannya. Pada dasarnya pemikiran politik Ibnu Khaldun mendahului pemikiran politik Jean Jacques Rousseau terkait kedaulatan rakyat. Pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai bagian terpenting yang mesti dilakukan dalam pengolahan negara, dengan memberikan doktrin demokratik tentang kedaulatan rakyat yang selama dua ratus tahun belakangan telah mendominasi dunia.²⁰ Yang pada dasarnya telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terkait persoalan kedaulatan rakyat yang berwujud dalam solidaritas sosial.

Penjelasan dalam *Muqaddimah* terkait solidaritas sosial yang menjadi penentu suatu negara berdaulat atau bahkan melahirkan negara baru yang didukung oleh solidaritas sosial yang bersumber dari rakyat. Terkait penjelasan tersebut dipaparkan bahwa:

“Begitu solidaritas sosial tersebut memperoleh kedaulatan atas rakyat golongannya, maka sesuai dengan wataknya ia akan mencari solidaritas sosial golongan yang tak ada hubungan dengannya. Apabila solidaritas sosial yang satu sama dengan yang lain, maka orang-orang yang berada di bawah masing-masing solidaritas sosial akan sebanding dan sama. Dalam keadaan demikian, masing-masing solidaritas sosial akan tetap memegang kekuasaannya atas daerah dan rakyatnya. Namun apabila suatu solidaritas sosial dapat mengalahkan dan menaklukkan solidaritas sosial yang lain. Keduanya akan bercampur baur dengan akrabnya, yang kalah memberikan dukungan tenaga kepadanya dan kemudian yang menang dan kemudian secara bersama-sama menuntut tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan dan dominasi yang dimilikinya sebelum itu. Demikianlah terus-menerus, sehingga kedaulatannya sama dengan kedaulatan negeri yang sedang berkuasa”.²¹

Dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menempatkan rakyat menjadi faktor penentu keberadaan suatu negara, yang tidak terlepas dari solidaritas sosial. Sesungguhnya pemikiran Ibnu Khaldun terkait solidaritas sosial yang dimiliki oleh rakyat, pada dasarnya menjadi pijakan dalam memberikan kebebasan secara demokrasi tanpa adanya perbedaan antara status sosial. Sebab yang diperlukan dalam membesarkan dan membuat suatu negara berjaya yakni adanya modal dukungan dari rakyat, yang senantiasa mendorong dan menyokong demi kepentingan negara.

KESIMPULAN

Pemikiran politik Ibnu Khaldun terkait dengan negara pada masanya, tentu negara yang dimaksudkan pada masa itu kerajaan atau dinasti yang dikendalikan oleh klan-klan tertentu. Sehingga konteks negara pada masa ini, adalah negara dengan sistem demokrasi. Tetapi, pemikiran-pemikiran politik Ibnu Khaldun banyak menempatkan rakyat sebagai bagian terpenting dalam keberlangsungan suatu negara lewat solidaritas sosial.

Posisi Ibnu Khaldun sebagai pemikir Islam menjadi sangat sentral dalam

²⁰ David Thomson, *Political Ideas* diterjemahkan oleh Team API dengan judul *Pemikiran-Pemikiran Politik* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986), h. 155.

²¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha dengan judul *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 167.

mengawali analisis-analisis sosiologis berdasarkan *badawah* dan *hadarah* dalam melihat fenomena kehidupan kemasyarakatan yang lebih kompleks. Sehingga melakukan pengkajian terhadap pemikirannya menjadi sangat penting dan masih sangat relevan dalam konteks kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Khudairi, Zainab. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Bandung: Pustaka, 1995.
- Baali, Fuadi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Farid, Syed Alatas, *Ibn Khaldun*. Terj. Isma Soekoto dan Ahmad Baiquni, *Ibn Khaldun Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi*. Bandung: Mizan, 2017.
- Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Cet; III, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Ishom, M. El-Saha dan Saiful Hadi El-Sutha, *Profil Ilmuwan Muslim Perintis Ilmu Pengetahuan Modern*. Jakarta: Fauzan Inti Kreasi, 2004.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Cet; V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang 1978.
- Suryajaya, Martin, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik*. Serpong: Marjin Kiri, 2016.

Copyright Holder :
©Sulfan,Mukhsin(2021)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:
CC BY SA